

BAB III

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN DONALD TRUMP**

Sebagai pembahasan awal di bab ketiga, penulis akan menjelaskan hal yang menjadi latar belakang Presiden Donald Trump dalam memilih atau memutuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di sektor perdagangan selama masa pemerintahannya. Bab ini juga akan membahas mengenai fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan tema *America First* di bidang perdagangan yang terbagi menjadi empat bagian yaitu mempertahankan kedaulatan nasional, penerapan ketat undang-undang perdagangan Amerika Serikat, penggunaan *leverage* untuk akses yang lebih luas ke pasar asing, serta menegosiasikan perjanjian yang lebih baik. Selain itu, di dalam bab ini penulis juga akan memberikan gambaran mengenai proses renegotiasi NAFTA yang dimulai di tahun 2017 dan telah selesai di tahun 2018.

A. Landasan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang menganut sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik dimana dua partai besar tersebut lah yang selalu menghadirkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk rakyat Amerika Serikat. Kedua partai tersebut memiliki perbedaan sejarah dan ideologi atau pandangan masing-masing

mengenai bagaimana mereka membawa aspek politik, militer, sosial budaya dan ekonomi untuk memajukan Amerika Serikat.

Partai Demokrat berfokus pada lingkup domestik dan tidak terlalu agresif dalam hal kebijakan luar negeri. Mereka menekankan pemerintahannya pada peningkatan struktur sosial sekaligus tanggung jawab bersama. Sementara Partai Republik menitikberatkan dominasinya dalam hubungan internasional. Mereka pro terhadap kesetaraan, kebebasan yang termasuk di dalamnya adalah kebebasan ekonomi (pasar bebas) (Otieno, 2019).

Table 2.1

Perbedaan Antara Partai Demokrat dan Partai Republik

| Demokrat | Republik |
|---|--|
| Liberal | Konservatif |
| Menekankan kebebasan, hak serta tanggung jawab tiap individu | Memandang penting kesetaraan dan tanggung jawab sosial |
| Pemotongan pajak hanya berlaku untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan menengah | Pemotongan pajak berlaku untuk semua orang termasuk perusahaan besar dan orang kaya |
| Membatasi penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain | Menggunakan cara yang keras (militer) dalam menghadapi negara-negara lain |
| Mendukung intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian negara | Mendukung penuh pasar bebas (<i>free market</i>) dan tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah |

Sumber : (Otieno, 2019)

Pemilihan umumnya sendiri dilakukan setiap empat tahun sekali pada bulan November di tahun-tahun genap dan selalu diselenggarakan di hari Selasa pada minggu pertama. Di tahun 2016, Amerika Serikat melakukan Pemilihan Umum Presiden yang ke-58 dengan Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik dan Hillary Clinton sebagai kandidat dari Partai Demokrat.

Masa kampanye untuk kedua calon Pemilihan Umum di tahun 2016 dimulai sejak satu tahun sebelumnya dan berakhir satu hari sebelum tanggal pemungutan suara. Donald Trump sendiri secara resmi memulai kampanyenya pada tanggal 16 Juni 2015 di kota New York (Alberta, 2016).

Selama masa kampanye pemilihannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memperkenalkan sebuah slogan yang berbunyi "*Make America Great Again*". Meski slogan tersebut juga pernah digunakan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan serta George H.W. Bush di tahun 1980 dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di tahun 1992, Donald Trump telah menandatangani hak eksklusif untuk menggunakan kalimat "*Make America Great Again*" dalam kepentingan politik kepada *U.S. Patent and Trademark Office* pada November 2012, lima hari setelah dia meminta pengacaranya mematenkan slogan tersebut.

Slogan "*Make America Great Again*" memiliki arti yang penting dimana Donald Trump mengatakan bahwa slogan tersebut merupakan keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika Serikat di mata dunia. Slogan tersebut memuat solusi atas permasalahan yang dialami oleh Amerika Serikat seperti masalah-masalah hukum, keamanan dan ketertiban di perbatasan atau masalah-masalah perdagangan, sehingga Donald Trump menjadikan "*Make America Great Again*" sebagai landasan sekaligus tujuan dalam pengambilan kebijakan luar

negerinya dengan berjanji akan memperbaiki dan memperkuat politik atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama periode kepemimpinannya (Pappas, 2015).

B. Fokus Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bidang Perdagangan

Dengan berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, negara-negara bangsa mulai berkembang. Pertumbuhan mereka didorong oleh arus globalisasi yang membuat mereka saling berinteraksi dan terkait satu sama lain. Hal tersebut yang kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai kebijakan atau politik luar negeri (*foreign policy*) sebagai sarana untuk menentukan strategi dan sikap yang berkaitan dengan hubungannya dengan negara lain atau hubungannya dengan dunia internasional.

Politik luar negeri dinilai sebagai keputusan dan tindakan suatu negara dalam menghadapi lingkungan eksternalnya demi mempertahankan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya politik luar negeri diambil melalui sebuah proses perumusan yang melibatkan ide-ide dari para pembuat kebijakan yang terlibat di dalamnya.

Donald Trump menganggap bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di periode-periode sebelumnya dalam keadaan kacau dan lebih banyak membawa kerugian pada kondisi perekonomian negara. Karenanya dia akan fokus mengembalikan kekuatan ekonomi Amerika Serikat di area global. Kebijakan luar negeri di sektor perdagangan yang dirancang selama periode kepemimpinan Presiden Donald Trump akan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, bisnis dan keamanan, menciptakan berbagai lapangan kerja, memperbaiki hubungan dengan negara-negara mitra, serta memperluas industri.

Melalui pandangannya dengan sasaran “*to Make America Great Again*”, begitu dirinya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tepatnya pada tanggal 20 Januari 2017, Donald Trump dan administrasinya mengambil tema “*America First*” sebagai tema dari kebijakan luar negerinya. “*America First*” berarti pemerintah akan mengutamakan kepentingan negara.

Mereka akan mengembalikan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia dan tidak akan membiarkan pihak lain mengambil keuntungan dari Amerika Serikat (McMaster & Cohn, 2017). Sehingga, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan tema “*America First*” di sektor perdagangan akan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu :

1. Mempertahankan Kedaulatan Nasional

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam WTO (*World Trade Organization*) ditandai dengan persetujuan Kongres terhadap Undang-Undang Perjanjian Putaran Uruguay pada akhir tahun 1994. WTO yang terbentuk setelah diadakannya pembicaraan mengenai pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan global, menjadi satu-satunya organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurus peraturan perdagangan antar negara-negara di dunia. Saat ini jumlah negara yang terdaftar dalam keanggotannya adalah sebanyak 164 negara.

Dengan bergabung ke WTO, negara-negara tersebut secara otomatis setuju dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dituliskan. Salah satunya adalah peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk menangani perselisihan antar anggota, dibentuk DSB atau *Dispute Settlement Body* yang akan menentukan hasil akhir atau solusi bagi permasalahan.

Dalam DSB terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa WTO tidak dapat menambah atau mengurangi hak atau kewajiban negara-negara anggotanya. Ketentuan itu

tercantum pada Pasal 3 sebagai arahan untuk DSB WTO dalam mengadopsi rekomendasi penyelesaian sengketa, serta di Pasal 19 untuk Panel (*Dispute Panel*) dan Badan Banding (*Appellate Body*) saat menjabarkan rekomendasi mereka untuk diadopsi oleh DSB.

Ketentuan itu membuat Amerika Serikat yakin bahwa DSB WTO tidak akan mengubah kewajiban sekaligus haknya. Hal serupa juga ditegaskan dalam *19 U.S.C. § 3533 (f)* atau bab 19 *United States Code* bagian 3533 poin (f) dalam Undang-Undang Perjanjian Putaran Uruguay yang ditandatangani oleh Kongres, yaitu (World Trade Organization, 2018) :

“If the report is adverse to the United States, consult with the appropriate congressional committees concerning whether to implement the report’s recommendation and, if so, the manner of such implementation and the period of time needed for such implementation.”

Serta pada *19 U.S.C. § 3512 (a) (1)* (Grimmett, 2007):

“No provision of any of the Uruguay Round Agreements, nor the application of any such provision to any person or circumstance, that is inconsistent with any law of the United States shall have effect.”

Artinya, ketika Panel atau Badan Banding menentang Amerika Serikat, keputusan yang dikeluarkan oleh DSB tidak akan selalu mengubah hukum atau tindakan Amerika Serikat. Untuk itu, di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat akan secara agresif membela kedaulatannya terkait masalah kebijakan perdagangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap masih kurang, membuat Amerika Serikat memilih untuk mengambil alih pengambilan keputusan akhir terkait perselisihan

yang dialaminya dengan negara lain dari DSB WTO dan sebagai gantinya akan menarik keputusan berdasarkan hukum Amerika Serikat yang berlaku (Stratfor, 2017).

2. Penerapan Ketat Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat telah mempertahankan serangkaian undang-undang yang dirancang untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang merugikan pasar oleh pihak lain, misalnya *Trade Act of 1974* atau *Trade Expansion Act of 1962*. Selain memuat poin-poin yang ditujukan untuk mendukung sistem perdagangan bebas dan adil di Amerika Serikat, undang-undang tersebut juga mencerminkan banyak prinsip-prinsip penting dan hak-hak hukum dari sistem perdagangan multilateral yang dibuat dengan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* pada tahun 1947.

Pengimplementasian dari undang-undang perdagangan Amerika Serikat, contohnya pada Bagian 301 dari *Trade Act of 1974* yang memberikan wewenang kepada Presiden yang sedang menjabat untuk mengambil tindakan demi menjaga kepentingan Amerika Serikat, berkaitan dengan hal tersebut, melihat banyaknya terjadi praktik atau aktor-aktor yang mengambil keuntungan ekonomi secara tidak adil dari Amerika Serikat, misalnya dalam permasalahan terkait perizinan atau pencurian kekayaan intelektual, yang menyebabkan penurunan standar hidup dan penyalahgunaan alokasi sumber daya, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kemudian mengambil tindakan untuk menghentikan keadaan tersebut dengan cara memperkuat penerapan hukum perdagangan Amerika Serikat dan melakukan penyelidikan.

3. Penggunaan *Leverage* untuk Membuka Pasar Asing

Perdagangan internasional merupakan aspek penting untuk membangun perekonomian dan memenuhi kebutuhan suatu negara. Dengan dilakukannya perdagangan internasional, pasar menjadi semakin terbuka melalui penghapusan hambatan-hambatan dalam kegiatan ekspor ataupun impor. Di dalam sistem perekonomian yang bersifat terbuka, biasanya suatu negara akan lebih mengutamakan ekspor daripada impor, salah satunya adalah Amerika Serikat (Muharami & Novianti, 2018).

Kegiatan ekspor dipandang sebagai aspek penting dari sumber pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, namun seringkali menghadapi hambatan-hambatan di beberapa pasar dimana negara-negara lain memberlakukan tarif yang tinggi dan mempertahankan hambatan non-tarif lainnya untuk barang-barang Amerika Serikat sehingga menghalangi akses pasar.

Untuk mengatasi itu semua, Pemerintahan Donald Trump akan menggunakan semua sumber *leverage* yang memungkinkan untuk membuka jalan menuju pasar asing yang lebih luas dan lebih adil. Yang dimaksud dengan *leverage* sendiri adalah penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki beban tetap seperti hutang atau saham istimewa dengan tujuan meningkatkan keuntungan (Riadi, 2016). Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi, tidak hanya nasional tetapi juga secara global, dengan cara mendobrak hambatan-hambatan perdagangan dan meningkatkan daya saing.

4. Menegosiasikan Perjanjian Dagang yang Lebih Baik

Sejak akhir tahun 1980-an, Amerika Serikat telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama perdagangan yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja juga peluang bagi bisnis. Beberapa di antaranya termasuk juga perjanjian perdagangan yang melibatkan banyak negara seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) atau CAFTA (*Central American Free Trade Agreement*).

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump akan secara aktif terlibat dalam kesepakatan dagang antar negara yang lebih baik, adil dan seimbang. Amerika Serikat akan terus membuka diri untuk potensi-potensi kerjasama perdagangan bilateral di masa mendatang untuk mengejar tercapainya kemakmuran.

Dengan mempertimbangkan keempat pilar di atas, Presiden Donald Trump telah mengambil beberapa tindakan dalam bentuk Perintah Eksekutif serta Memorandum Presiden sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri "*America First*"-nya, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Merenegosiasi *North American Free Trade Agreement* (NAFTA)
- Memperkuat penegakkan tindakan *anti-dumping* dan *countervailing duties*
- Melakukan penyelidikan terhadap impor baja dan aluminium
- Meminta peninjauan kembali dan kemungkinan melakukan pembaharuan pada *United States-Korea Free Trade Agreement* (KORUS FTA)
- Memulai penyelidikan Bagian 301 terkait pencurian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh China

C. Proses Renegosiasi NAFTA

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang mulai berlaku di tahun 1994, menjadi perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* paling komprehensif yang pernah dinegosiasikan oleh Amerika Serikat. NAFTA menghapus hampir semua tarif di antara ketiga negara anggota dan membawa Amerika Serikat, Kanada serta Meksiko menuju tingkat liberalisasi perdagangan yang lebih dalam lagi dengan mendorong laju perdagangan, investasi lintas batas dan integrasi jaringan produksi (Villarreal & Fergusson, 2017).

Pada bulan April 2017, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menarik Amerika Serikat keluar dari NAFTA dan sebagai gantinya dia memilih untuk menegosiasi ulang perjanjian perdagangan tersebut. Lalu pada pertengahan bulan Mei 2017, Presiden Donald Trump dan administrasinya memberikan pemberitahuan kepada Kongres Amerika Serikat bahwa dia akan memenuhi janji kampanyenya yaitu untuk menegosiasikan kembali *North American Free Trade Agreement*.

Dengan mengirimkan *90-day notification* kepada Kongres Amerika Serikat di tanggal 18 Mei 2017 sebagai langkah awal dimulainya pembicaraan untuk menegosiasikan kembali *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), Robert Lighthizer yang menjabat sebagai *U.S. Trade Representative* mengatakan bahwa Amerika Serikat akan merenegosiasikan NAFTA secara trilateral bersama Kanada dan Meksiko atau secara bilateral jika pembicaraan yang melibatkan ketiga negara tidak disetujui.

Tetapi, pemerintah Kanada dan Meksiko sepakat memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka siap untuk melakukan negosiasi ulang *North American Free Trade Agreement* bersama-sama dikarenakan beberapa alasan. Pertama, karena cakupan peraturan-peraturan dalam NAFTA sudah tidak sesuai dengan zaman dan perlu diperbarui. Kanada dan Meksiko juga merasa bahwa peraturan mengenai lingkungan dan tenaga kerja sangat penting sehingga harus dimasukkan ke dalam perjanjian utama (Villarreal & Fergusson, 2017).

Dan pada 17 Juli 2017, setelah melakukan konsultasi dengan Kongres, publik dan sektor swasta, pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative*, mengeluarkan dokumen yang berisikan poin-poin penting yang menjadi sasaran utama atau ketentuan-ketentuan apa saja yang akan dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dalam perbicangannya dengan Kanada dan Meksiko, misalnya modernisasi terkait peraturan tentang hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), tenaga kerja, investasi, lingkungan, pengadaan pemerintah (*government procurement*) dan di beberapa peraturan lainnya (Office of the United States Trade Representative, 2017).

Akhirnya pada 16 Agustus 2017, proses renegotiasi dilakukan bersama kedua negara. Perwakilan dari Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko bertemu di Washington D.C (Villarreal & Fergusson, 2019). Untuk topik yang dibahas oleh ketiga negara anggota pada putaran pertama renegotiasi itu sendiri berjumlah kurang lebih 30 buah, antara lain mengenai peraturan terkait akses pasar, tekstil, jasa keuangan, investasi, tenaga kerja, *government purchasing*, sanitasi, fitosanitari, kekayaan intelektual, akses masuk sementara, *rules of origin*, *cross-corder services*, telekomunikasi, aturan untuk *state-owned enterprises*, mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketentuan-ketentuan baru yang ingin ditambahkan

ke dalam perjanjian seperti peraturan tentang perdagangan digital, usaha kecil dan menengah, anti-korupsi dan transparansi (Lopez, 2017).

Setelah putaran pertama, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kembali melakukan beberapa kali pertemuan sampai bulan Juni 2018 dimana terhitung bahwa ketiga negara telah melakukan pembicaraan sebanyak tujuh kali. Di bulan selanjutnya, yaitu Juli 2018, Amerika Serikat dan Meksiko mengadakan pertemuan secara terpisah untuk membahas tentang aturan-aturan pada sektor otomotif (EDC, 2018).

Kemudian pada 27 Agustus di tahun yang sama, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Meksiko, disusul dengan keikutsertaan Kanada dalam kesepakatan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018. Momen tersebut menandai terbentuknya USMCA (*United States-Mexico-Canada Agreement*) sebagai bentuk dari modernisasi NAFTA. Proses renegotiasi pun dianggap telah selesai dengan penandatanganan USMCA oleh ketiga negara pada 30 November 2018.

Karena merupakan perkembangan dari NAFTA yang sudah ada sebelumnya, beberapa poin-poin yang terkandung di dalam USMCA merupakan ketentuan-ketentuan yang telah diperbarui. Misalnya peraturan tentang *country of origin*. Agar tarif menjadi nol, NAFTA mengharuskan komponen mobil yang dapat diperjual belikan di negara-negara NAFTA 62,5% dibuat di Amerika Serikat, Kanada atau Meksiko. Di bawah USMCA, pemberlakuan persentase 62,5% untuk komponen mobil tersebut sekarang ditujukan untuk memperkuat sektor manufaktur serta kualitas tenaga kerja di bidang otomotif ketiga negara (Mo, 2019).

Sementara itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang berbeda dari kedua perjanjian perdagangan regional di wilayah Amerika Utara tersebut. Salah satunya adalah *sunset clause*,

yaitu kebijakan yang menetapkan kapan suatu hukum, undang-undang atau peraturan akan berhenti berlaku. Berbeda dengan NAFTA yang tidak menetapkan *sunset clause*, USMCA menentukan bahwa baik Amerika Serikat, Kanada atau pun Meksiko dapat menarik diri dari perjanjian dagang mereka setelah memberikan pemberitahuan enam bulan.

USMCA sendiri hanya berlaku selama 16 tahun. Masing-masing perwakilan dari ketiga negara akan berkumpul setiap 6 tahun sekali untuk memperbaiki masalah-masalah akibat perjanjian, sekaligus menegosiasikan kemungkinan masa perpanjangan. *Sunset clause* yang dimuat dalam USMCA merupakan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, perbedaan ketentuan-ketentuan dalam dokumen peraturan NAFTA dan USMCA sendiri akan dituliskan dalam tabel di bawah.

Table 3.1

Perbedaan Peraturan Dalam NAFTA dan USMCA

| Ketentuan | NAFTA | USMCA |
|----------------------|--|---|
| Agrikultur | Menghapus semua tarif produk pertanian dengan Meksiko dan sebagian besar dengan Kanada, kecuali tarif untuk susu, unggas, telur, juga gula | Peningkatan akses untuk produk susu, unggas dan telur Amerika Serikat ke pasar Kanada |
| Lingkungan | Perusahaan dapat menuntut pemerintah jika ada kebijakan yang dirasa akan merusak laba perusahaan di masa yang akan datang | Menghapuskan hukum yang dapat digunakan perusahaan untuk melawan peraturan terkait lingkungan |
| <i>Sunset Clause</i> | Tidak ada tanggal atau jangka waktu yang menentukan kapan perjanjian berhenti diberlakukan | Perjanjian akan berakhir setelah 16 tahun berjalan |
| Hak Kekayaan | Jangka waktu hak cipta hingga | Jangka waktu hak cipta |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Intelektual | 50 tahun di luar usia penulis | menjadi 70 tahun |
| Tenaga Kerja | Merupakan perjanjian sampingan | Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko diharuskan mengadopsi serta menegakkan hukum tenaga kerja yang ditetapkan <i>International Labor Organization</i> . Selain itu, 40-50% suku cadang mobil harus dibuat di pabrik dengan upah pekerja setidaknya \$16/jam |
| Perdagangan Digital | Tidak termasuk dalam perjanjian | Pelarangan pemberian bea cukai dan tindakan diskriminatif lainnya pada produk-produk digital yang didistribusikan secara elektronik (<i>e-book, video, musik, perangkat lunak, game, dll</i>), sekaligus mendukung aliran data lintas batas |
| Mata Uang | Tidak termasuk dalam perjanjian | Ketiga negara diharuskan mempertahankan nilai tukar yang telah ditentukan oleh pasar dan dilarang melakukan devaluasi |
| Penyelesaian Sengketa | Memiliki tiga jenis sistem penyelesaian sengketa yaitu Bab 11 (perselisihan antara perusahaan dan pemerintah), Bab 19 (<i>antidumping</i> dan <i>countervailing duty</i>), serta Bab 20 (perselisihan antar negara) | Membatasi penerapan Bab 11 antara Amerika Serikat-Meksiko dan menghilangkannya dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat-Kanada |
| <i>Rules of Origin</i> | 62,5% persen komponen <i>automobile</i> harus diproduksi di Amerika Serikat, Kanada atau Meksiko untuk memenuhi syarat pemberlakuan tarif nol | Berubah menjadi 75% |

| | | |
|-------------|---------------------------------|---|
| Usaha Kecil | Tidak termasuk dalam perjanjian | Pembentukan komite untuk mengurus masalah-masalah usaha kecil untuk membantu perusahaan berkontribusi dalam perdagangan internasional |
|-------------|---------------------------------|---|

Sumber : (Pacific NorthWest Economic Regional, 2019)